

KONTRIBUSI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP PENYEDERHANAAN PROSEDUR ADMINISTRASI PERIZINAN DI GORONTALO

Adrianto Lakoro

Email: adrianto.lakoro88@gmail.com

Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak: Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien dan mendukung pertumbuhan investasi. Kebijakan ini dijalankan melalui Online Single Submission (OSS) untuk menyederhanakan prosedur administrasi perizinan di berbagai daerah, termasuk Gorontalo. Penelitian ini berfokus pada kontribusi perizinan berbasis risiko terhadap penyederhanaan prosedur administrasi perizinan serta dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha di Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko mampu menyederhanakan proses perizinan dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga mempermudah pengusaha dalam mengakses layanan perizinan. Pelaku usaha dapat dengan cepat memahami persyaratan dan alur permohonan izin yang disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha mereka. Hal ini mengurangi hambatan administratif, mempersingkat waktu pengurusan izin, serta meningkatkan transparansi. Dampak lainnya adalah meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap usaha dengan risiko tinggi, sehingga mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban administrasi perizinan. Di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem OSS, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan infrastruktur digital, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi pengawasan berbasis risiko agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha di Gorontalo.

Kata Kunci: Perizinan Berbasis Risiko, Online Single Submission (OSS), Penyederhanaan, Administrasi Perizinan, Gorontalo.

PENDAHULUAN

Perizinan usaha merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung perkembangan ekonomi suatu daerah. Di Gorontalo, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, proses perizinan seringkali dianggap rumit dan memakan waktu. Hal ini menjadi penghambat bagi para pengusaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), yang sangat membutuhkan kemudahan dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka. Dalam upaya untuk memperbaiki sistem perizinan, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi perizinan dan meningkatkan investasi di daerah, termasuk Gorontalo.

Penerapan perizinan berbasis risiko diharapkan dapat mengurangi beban administratif yang dihadapi oleh pengusaha. Menurut data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sekitar 60% pengusaha di Indonesia mengeluhkan kompleksitas dan lamanya proses perizinan yang mereka hadapi (BKPM, 2021). Dengan adanya OSS, diharapkan proses perizinan dapat lebih

cepat dan transparan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini tetap ada, terutama dalam hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang sistem baru ini.

Data awal menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, tingkat investasi di daerah ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo, pada tahun 2022, total investasi yang masuk ke Gorontalo hanya mencapai Rp 1,5 triliun, jauh di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (BPS Gorontalo, 2022). Salah satu faktor penyebabnya adalah proses perizinan yang dianggap rumit dan memakan waktu.

Dalam konteks ini, penerapan perizinan berbasis risiko melalui OSS diharapkan dapat menjadi solusi untuk menarik lebih banyak investor. Sistem ini memungkinkan pengusaha untuk mengajukan izin secara online, memudahkan akses informasi, dan mempercepat proses verifikasi. Selain itu, dengan pendekatan berbasis risiko, pemerintah dapat lebih fokus pada usaha yang memiliki potensi dampak tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Dalam analisis Das Sein (keadaan saat ini) dan Das Solen (keadaan yang diharapkan), kita dapat melihat perbedaan signifikan antara situasi sebelum dan sesudah penerapan perizinan berbasis risiko. Sebelum adanya OSS, pengusaha di Gorontalo sering menghadapi berbagai kendala seperti banyaknya dokumen yang harus dipenuhi, waktu tunggu yang lama, dan kurangnya transparansi dalam proses perizinan. Hal ini menyebabkan banyak pengusaha, terutama UKM, memilih untuk tidak mengurus izin usaha karena merasa prosesnya tidak sebanding dengan manfaat yang didapat.

Dengan adanya OSS dan perizinan berbasis risiko, proses administrasi perizinan menjadi lebih sederhana dan efisien. Pengusaha dapat mengajukan izin hanya dengan beberapa langkah mudah dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai persyaratan yang diperlukan. Di samping itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih responsif dalam menangani permohonan izin, sehingga waktu tunggu dapat dipangkas secara signifikan. Hal ini tentu akan meningkatkan daya tarik Gorontalo sebagai lokasi investasi.

Salah satu hal menarik dari penerapan perizinan berbasis risiko adalah bagaimana sistem ini dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Setiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatan yang diterapkan dalam perizinan harus sesuai dengan kondisi lokal. Di Gorontalo, misalnya, sektor perikanan dan pertanian merupakan sektor unggulan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses perizinan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan pengawasan lebih ketat dan sektor-sektor yang dapat dipermudah proses perizinannya.

Selain itu, penerapan OSS juga membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan. Melalui platform online, masyarakat dapat mengakses informasi dan memberikan masukan terkait kebijakan perizinan yang diterapkan. Ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perizinan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, perizinan berbasis risiko tidak hanya

menjadi alat untuk menyederhanakan proses, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perizinan berbasis risiko juga membawa implikasi yang lebih luas terhadap iklim investasi di Gorontalo. Dengan mengurangi hambatan yang ada dalam proses perizinan, pemerintah daerah dapat menarik perhatian investor, baik lokal maupun asing. Misalnya, jika proses perizinan untuk usaha di sektor pariwisata dipermudah, hal ini dapat mendorong investor untuk membangun hotel, restoran, atau atraksi wisata baru yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Sebuah studi menunjukkan bahwa daerah yang memiliki sistem perizinan yang efisien cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang masih mengandalkan prosedur yang rumit (World Bank, 2020).

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi pemerintah daerah Gorontalo untuk melakukan sosialisasi yang efektif terkait OSS dan perizinan berbasis risiko. Banyak pengusaha, terutama dari kalangan UKM, mungkin belum sepenuhnya memahami manfaat dan cara kerja sistem ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadakan pelatihan dan workshop yang dapat membantu pengusaha memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan izin secara online. Dengan demikian, mereka akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menggunakan sistem baru ini.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang mendukung OSS berfungsi dengan baik. Ketersediaan internet yang cepat dan stabil sangat penting untuk memastikan bahwa pengusaha dapat mengakses sistem secara efektif. Di Gorontalo, masih ada beberapa daerah yang mengalami kendala dalam hal akses internet, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan jaringan telekomunikasi di wilayah tersebut. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan pengusaha dapat dengan mudah mengajukan izin dan berkomunikasi dengan instansi pemerintah terkait.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penerapan perizinan berbasis risiko juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses perizinan tidak hanya fokus pada kemudahan bagi pengusaha, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan usaha yang akan dilakukan. Misalnya, untuk sektor perikanan, pemerintah harus memastikan bahwa izin yang diberikan tidak merusak ekosistem laut dan sumber daya ikan yang ada. Dengan demikian, pendekatan berbasis risiko dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

METODE

Penelitian ini akan menganalisis Kontribusi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Penyederhanaan Prosedur Administrasi Perizinan Di Gorontalo. mencakup evaluasi infrastruktur teknis OSS, seperti platform online dan sistem integrasi data antarinstansi, serta peran petugas dalam proses perizinan. Selain itu, penelitian juga akan meneliti hambatan struktural, administratif, dan kelembagaan yang memengaruhi kinerja OSS, termasuk kendala koordinasi antar lembaga pemerintah dan kepatuhan terhadap prosedur standar.

Selanjutnya, penelitian akan mengevaluasi Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Diterapkan Dalam Penyederhanaan Prosedur Administrasi Perizinan Di

Gorontalo Reformasi perizinan di Indonesia telah menjadi salah satu langkah strategis yang sangat penting untuk mendorong percepatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, penerapan konsep perizinan berusaha berbasis risiko di Gorontalo tidak hanya sekadar mengikuti kebijakan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk menyederhanakan prosedur administrasi perizinan yang sebelumnya dianggap lambat, rumit, dan birokratis. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memfasilitasi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah

Dampak penerapan perizinan berbasis risiko terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam proses administrasi perizinan. Peran sistem OSS (Online Single Submission) dalam mendukung pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menyederhanakan administrasi perizinan. Penelitian ini juga akan menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan implementasi OSS berbasis risiko. Rekomendasi tersebut akan meliputi perbaikan teknis infrastruktur OSS, peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas petugas dalam pengelolaan OSS, serta langkah-langkah penguatan hukum dan penegakan aturan untuk mencegah korupsi dan pungutan liar dalam proses perizinan. Akhirnya, hasil penelitian akan disajikan dalam laporan atau publikasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki implementasi OSS berbasis risiko. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas dan manfaat sistem OSS berbasis risiko untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Diterapkan Dalam Penyederhanaan Prosedur Administrasi Perizinan Di Gorontalo

Reformasi perizinan di Indonesia telah menjadi salah satu langkah strategis yang sangat penting untuk mendorong percepatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, penerapan konsep perizinan berusaha berbasis risiko di Gorontalo tidak hanya sekadar mengikuti kebijakan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk menyederhanakan prosedur administrasi perizinan yang sebelumnya dianggap lambat, rumit, dan birokratis. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan memfasilitasi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Penerapan Perizinan Berbasis Risiko di Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengadopsi sistem perizinan berbasis risiko melalui penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Sistem OSS ini menjadi instrumen utama dalam menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Dengan adanya OSS, pelaku usaha di Gorontalo dapat mengakses seluruh proses perizinan melalui satu platform digital yang terintegrasi. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga pengajuan izin operasional dan izin komersial. Hal ini tentu saja mempermudah pelaku usaha dalam mengurus perizinan yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Pendekatan berbasis risiko ini membagi kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko yang dihasilkan terhadap

keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan perekonomian. Tiga kategori risiko utama yang ditetapkan dalam sistem ini adalah risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Risiko rendah mencakup usaha-usaha yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti UMKM yang bergerak di bidang perdagangan atau jasa sederhana. Usaha-usaha ini hanya memerlukan pendaftaran NIB tanpa harus memenuhi persyaratan teknis tambahan yang rumit. Sebagai contoh, seorang pedagang kecil yang menjual makanan ringan di pasar lokal hanya perlu mendaftar untuk mendapatkan NIB dan dapat langsung beroperasi tanpa harus melalui proses perizinan yang panjang.

Selanjutnya, untuk usaha yang termasuk dalam kategori risiko menengah, seperti restoran atau kafe, mereka diwajibkan untuk memenuhi standar tertentu. Misalnya, usaha restoran di Gorontalo harus memiliki sertifikat layak sehat dari dinas kesehatan terkait. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada penyederhanaan, tetap ada perhatian terhadap aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat. Terakhir, untuk usaha dengan risiko tinggi seperti kegiatan pertambangan atau pengelolaan sumber daya alam, proses perizinan menjadi lebih kompleks. Usaha-usaha ini memerlukan izin yang lebih mendalam, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), izin lokasi, dan izin operasional. Kegiatan ini memerlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat dapat dikelola dengan baik.

Penyederhanaan Prosedur Administrasi Perizinan Sebelum penerapan OSS RBA, perizinan usaha di Gorontalo sering menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Proses yang panjang dan berbelit-belit sering kali memerlukan interaksi langsung antara pelaku usaha dengan banyak instansi pemerintah, yang tidak jarang membuat pelaku usaha merasa frustrasi. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses perizinan juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi. Keterbatasan aksesibilitas bagi UMKM, terutama yang beroperasi di daerah terpencil, juga menjadi tantangan tersendiri. Melalui penerapan OSS, proses perizinan di Gorontalo kini menjadi lebih sederhana dan terpusat. Semua permohonan perizinan dapat dilakukan secara daring, sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk datang ke kantor pelayanan. Mereka dapat memantau status permohonan mereka secara real-time, yang tentunya meningkatkan efisiensi dan transparansi. Integrasi antarinstansi dalam sistem OSS juga menghilangkan duplikasi persyaratan yang sebelumnya memperpanjang waktu perizinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi proses perizinan dapat mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, serta meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan public

Manfaat Bagi Pelaku Usaha di Gorontalo Penerapan perizinan berbasis risiko di Gorontalo memberikan dampak positif yang signifikan, terutama bagi pelaku UMKM yang mendominasi perekonomian daerah. Beberapa manfaat yang dirasakan antara lain adalah penghematan waktu dan biaya, peningkatan daya saing investasi, serta transparansi dan kepastian hukum. Penghematan waktu dan biaya menjadi salah satu manfaat utama yang dirasakan oleh pelaku usaha. Dengan adanya NIB bagi usaha risiko rendah, pelaku usaha tidak lagi terbebani oleh biaya perizinan yang tinggi dan waktu yang lama. Mereka dapat langsung memulai kegiatan usaha tanpa harus menunggu proses perizinan yang berbelarut-larut. Sebagai contoh, seorang pengusaha muda yang memulai bisnis catering di Gorontalo kini bisa mendapatkan izin usaha dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan prosedur sebelumnya.

Selain itu, penerapan sistem yang lebih cepat dan transparan juga berkontribusi pada

peningkatan daya saing investasi di Gorontalo. Dengan kemudahan yang ditawarkan, Gorontalo menjadi daerah yang lebih menarik bagi investor. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang merupakan potensi besar bagi perekonomian daerah. Transparansi dan kepastian hukum yang ditawarkan oleh digitalisasi perizinan melalui OSS juga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah. Sistem ini mencegah terjadinya korupsi dan kolusi, karena mengurangi interaksi langsung antara pemohon dan pejabat pemerintah. Dengan demikian, pelaku usaha merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan usahanya tanpa adanya praktik yang merugikan.

Tantangan dalam Penerapan di Gorontalo Meskipun penerapan perizinan berbasis risiko di Gorontalo menunjukkan kemajuan yang signifikan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan sistem ini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur digital. Beberapa daerah terpencil di Gorontalo belum memiliki akses internet yang memadai, sehingga pelaku usaha di wilayah tersebut kesulitan untuk menggunakan sistem OSS. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam akses terhadap perizinan yang seharusnya dapat diperoleh secara mudah. Selain itu, kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang cara kerja OSS juga menjadi kendala. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan mekanisme yang ada dalam sistem ini, sehingga mereka membutuhkan pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait. Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha menjadi sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan sistem OSS dengan optimal. Koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan tersendiri. Sinkronisasi data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota masih sering menjadi kendala, terutama dalam proses verifikasi izin yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi agar proses perizinan dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

2. Dampak penerapan perizinan berbasis risiko terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam proses administrasi perizinan.

Penerapan perizinan berbasis risiko di Indonesia merupakan langkah penting dalam reformasi administrasi perizinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, menyederhanakan proses perizinan, dan mendorong kepatuhan pelaku usaha. Dalam konteks ini, pemerintah mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi, sehingga prosedur perizinan menjadi lebih terarah dan proporsional. Dampak dari kebijakan ini terhadap kepatuhan pelaku usaha sangat signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu dampak utama dari penerapan perizinan berbasis risiko adalah peningkatan kepatuhan administratif pelaku usaha. Sebelumnya, proses perizinan yang panjang dan rumit sering kali menjadi penghalang bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban mereka. Misalnya, pelaku usaha harus mengisi berbagai formulir, menghadiri beberapa pertemuan dengan pejabat pemerintah, dan memenuhi berbagai persyaratan yang sering kali tidak jelas. Dengan adanya sistem berbasis risiko, usaha yang dianggap berisiko rendah, seperti usaha mikro dan kecil (UMKM), kini hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat diperoleh secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Proses ini tidak hanya mempermudah pelaku usaha untuk memulai bisnis, tetapi juga mengurangi beban administrasi yang sebelumnya menjadi kendala utama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2021), pelaku usaha yang

mengalami kemudahan dalam proses perizinan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perizinan lainnya, seperti melaporkan kegiatan usaha secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa ketika proses perizinan disederhanakan, pelaku usaha lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan yang ada. Misalnya, seorang pengusaha kecil yang sebelumnya menunda pengajuan izin karena proses yang rumit, kini dapat dengan mudah mendapatkan NIB dan segera memulai usahanya. Dengan demikian, penerapan perizinan berbasis risiko tidak hanya meningkatkan kepatuhan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jumlah pelaku usaha yang beroperasi secara legal.

Digitalisasi melalui OSS juga memberikan dampak positif dalam menurunkan praktik non-kepatuhan. Dengan adanya sistem digital, transparansi dalam proses perizinan meningkat. Pelaku usaha tidak lagi harus berhadapan langsung dengan pejabat pemerintah, yang sebelumnya sering kali menjadi sumber potensi korupsi atau kolusi. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci untuk mendorong pelaku usaha agar memenuhi kewajiban administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, jika seorang pengusaha harus mengajukan izin melalui sistem OSS, mereka dapat melacak status permohonan mereka secara real-time, sehingga mengurangi kemungkinan adanya praktik penyimpangan.

Wibowo (2021) dalam bukunya menjelaskan bahwa dengan adanya transparansi, pelaku usaha lebih terdorong untuk mematuhi prosedur yang ditetapkan. Mereka tidak lagi memiliki peluang untuk menyalahi atau menghindari prosedur yang ditentukan, karena setiap langkah dalam proses perizinan dapat dipantau dan diawasi secara ketat. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya sekadar mempermudah proses, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi seluruh pelaku usaha.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Melalui pendekatan berbasis risiko, pengawasan menjadi lebih fokus dan efektif. Usaha yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi, seperti pertambangan atau pengelolaan limbah, memerlukan pemenuhan persyaratan tambahan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan izin lokasi. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha yang beroperasi di sektor-sektor tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko mengatur bahwa pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan berisiko tinggi harus memenuhi berbagai persyaratan yang lebih ketat, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka.

Namun, meskipun penerapan perizinan berbasis risiko memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang dapat memengaruhi kepatuhan pelaku usaha. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha, terutama di kalangan pelaku usaha kecil yang berada di daerah terpencil. Banyak dari mereka yang tidak memahami sepenuhnya konsep perizinan berbasis risiko dan bagaimana cara mengakses sistem OSS. Akibatnya, mereka sering kali kesulitan dalam memenuhi kewajiban perizinan yang baru. Misalnya, seorang pengusaha kecil di daerah terpencil mungkin tidak memiliki akses internet yang memadai untuk mengajukan izin secara daring, sehingga mereka terpaksa menggunakan cara-cara tradisional yang lebih rumit.

Ketersediaan infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan yang signifikan. Beberapa wilayah di Indonesia masih menghadapi kendala infrastruktur digital, yang menghalangi pelaku usaha untuk menggunakan platform OSS secara optimal. Misalnya, di daerah yang belum terjangkau jaringan internet, pelaku usaha mungkin tidak dapat mengakses sistem perizinan secara daring, sehingga mereka terpaksa mengandalkan proses manual yang lebih rumit dan memakan waktu. Hal ini tentu saja dapat

memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku.

Selain itu, ketidaksesuaian data antarinstansi sering kali mengakibatkan penundaan dalam proses verifikasi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepatuhan pelaku usaha. Ketika data yang dimiliki oleh satu instansi tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh instansi lain, proses verifikasi menjadi terhambat. Misalnya, jika data identitas pelaku usaha tidak cocok antara instansi pajak dan instansi perizinan, maka permohonan izin mereka akan tertunda. Hal ini dapat membuat pelaku usaha frustrasi dan berpotensi mengurangi niat mereka untuk mematuhi proses perizinan di masa mendatang.

Keberlanjutan kepatuhan pelaku usaha dalam sistem perizinan berbasis risiko sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan peningkatan infrastruktur teknologi. Pemerintah perlu terus mengedukasi pelaku usaha tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perizinan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan usaha mereka. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau program pelatihan yang menjelaskan proses perizinan berbasis risiko secara mendetail. Selain itu, integrasi data dan koordinasi antarinstansi perlu diperbaiki agar proses perizinan menjadi lebih efisien dan bebas hambatan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, pelaku usaha dapat menghindari masalah ketidaksesuaian data yang sering kali menjadi kendala dalam proses perizinan.

3. Peran sistem OSS (Online Single Submission) dalam mendukung pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menyederhanakan administrasi perizinan

Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan salah satu pilar utama dalam reformasi administrasi perizinan di Indonesia. Diluncurkan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, OSS bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perizinan, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Lebih dari sekadar alat teknis, OSS berfungsi sebagai sarana transformasi paradigma administrasi publik menuju pelayanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana OSS membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek perizinan di Indonesia.

Salah satu kontribusi utama OSS adalah penyederhanaan proses perizinan yang sebelumnya rumit. Dalam sistem tradisional, pelaku usaha dihadapkan pada berbagai tahapan birokrasi yang melibatkan banyak instansi. Proses ini sering kali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga menghambat perkembangan usaha dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Dengan hadirnya OSS, seluruh proses perizinan kini dapat dilakukan secara daring melalui satu portal yang terintegrasi. Pelaku usaha hanya perlu mendaftar dan mengisi data yang diperlukan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai izin dasar bagi kegiatan usaha berisiko rendah.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang ingin mendirikan usaha kuliner kini tidak perlu lagi mengurus izin dari berbagai instansi secara terpisah. Melalui OSS, ia cukup mengisi formulir secara online dan mendapatkan semua izin yang diperlukan dalam satu platform. Menurut Wibisono (2021), OSS memungkinkan pengelolaan data yang lebih terstruktur, sehingga dapat mengurangi duplikasi dokumen dan meminimalkan kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam proses manual. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pengelompokan risiko berdasarkan kategori usaha, yang membantu memastikan bahwa perizinan sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian, OSS tidak hanya menyederhanakan proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan

keandalan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan adalah aspek lain yang mengalami perbaikan signifikan berkat OSS. Sistem ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memantau proses perizinan mereka secara real-time. Hal ini mengurangi kemungkinan adanya praktik korupsi atau kolusi yang sebelumnya sering terjadi dalam interaksi langsung antara pelaku usaha dan pejabat pemerintah. Dalam konteks ini, sebuah studi oleh Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi melalui OSS meningkatkan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah. Proses yang lebih transparan dan waktu penyelesaian yang terukur menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha. Dwiyanto (2020) juga mengemukakan bahwa digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya mempercepat proses administratif tetapi juga memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.

Integrasi data antarinstansi adalah salah satu keunggulan utama dari OSS. Kemampuan sistem ini untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memungkinkan sinkronisasi informasi yang diperlukan untuk proses perizinan. Contohnya, data pajak, kepemilikan tanah, dan izin lingkungan dapat diakses secara bersamaan, sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi menyerahkan dokumen yang sama di berbagai instansi. Proses ini sangat mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin usaha. Namun, tantangan dalam implementasi OSS tetap ada, terutama terkait harmonisasi data antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal. Menurut penelitian oleh Yusuf dan Arifin (2022), kurangnya koordinasi antarinstansi dapat memperlambat proses verifikasi data, meskipun OSS secara teknis telah menyediakan platform yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa integrasi data dapat berjalan dengan baik, sehingga manfaat dari OSS dapat dirasakan secara maksimal oleh pelaku usaha.

Efisiensi biaya dan waktu juga menjadi dampak positif yang dihasilkan oleh OSS. Dalam sistem ini, pelaku usaha dapat menghindari biaya tambahan yang sering kali muncul akibat prosedur birokrasi yang panjang dan rumit. Berdasarkan studi oleh Sulistyio (2023), sistem OSS mampu memangkas waktu penyelesaian izin hingga 50% dibandingkan dengan sistem manual. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Dengan waktu yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.

Namun, meskipun OSS telah membawa banyak manfaat, tantangan dalam implementasi sistem ini masih perlu diatasi. Beberapa masalah utama yang dihadapi termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang cara kerja OSS, dan resistensi perubahan di tingkat birokrasi. Misalnya, di daerah terpencil, akses internet yang terbatas dapat menjadi penghambat utama dalam penggunaan OSS. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan bagi pelaku usaha dan pegawai pemerintah, serta meningkatkan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah dengan akses internet yang terbatas. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan OSS perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem ini terus berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.

Dalam kesimpulan, Sistem OSS memegang peran kunci dalam mendukung pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia. Dengan menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan mengintegrasikan data

antarinstansi, OSS telah membantu menciptakan ekosistem perizinan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Namun, untuk mencapai manfaat yang maksimal dan berkelanjutan, tantangan dalam implementasi harus segera diatasi. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan OSS dapat terus berkontribusi pada peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan sistem perizinan usaha yang berbasis pada analisis risiko melalui platform Online Single Submission (OSS) memberikan dampak yang signifikan dalam menyederhanakan prosedur administrasi perizinan di wilayah Gorontalo. Dengan adanya sistem ini, proses pengajuan izin menjadi lebih cepat, transparansi meningkat, dan beban administratif yang selama ini menjadi kendala utama bagi para pelaku usaha dapat diminimalisir. Pendekatan yang berbasis risiko ini memungkinkan pengawasan dan pengelolaan perizinan dapat lebih terfokus pada usaha yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, sedangkan usaha yang dianggap berisiko rendah dapat diproses dengan lebih efisien dan cepat.

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan perizinan yang berbasis risiko berkontribusi pada peningkatan kepatuhan para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya penyederhanaan dalam prosedur perizinan, pelaku usaha merasa lebih termotivasi untuk mengurus izin mereka karena proses yang lebih efisien dan mudah diakses. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai sistem ini, agar implementasi kebijakan ini dapat berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan perizinan yang berbasis pada analisis risiko memberikan dampak positif bagi iklim usaha dan investasi di Gorontalo. Penyederhanaan dalam administrasi perizinan melalui OSS tidak hanya mendukung percepatan dalam pelayanan publik, tetapi juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Namun demikian, diperlukan upaya yang berkesinambungan dari pihak pemerintah daerah dalam hal sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur teknologi untuk mengoptimalkan kontribusi dari kebijakan ini di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2022). "Integrasi Data dalam Sistem OSS: Studi Kasus di Jawa Tengah." *Jurnal Manajemen Publik*, 19(1)
- Bank Dunia. (2021). *Ease of Doing Business Report*. Washington, D.C.: World Bank Publications.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo (2023). *Laporan Tahunan Implementasi OSS di Gorontalo*.
- Dwiyanto, A. (2020). *Reformasi Birokrasi di Era Digital*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). *Laporan Tahunan Implementasi OSS*. Jakarta: Kementerian Investasi.
- Nugroho, A. (2022). "Tantangan Digitalisasi Pelayanan Publik di Indonesia." *Jurnal Reformasi Administrasi Publik*, 18(4),
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Kontribusi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Penyederhanaan Prosedur Administrasi Perizinan Di Gorontalo

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Sari, R. (2021). "Dampak Digitalisasi Proses Perizinan Terhadap Kinerja Usaha Kecil dan Menengah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 1

Sulistyo, T. (2023). "Efektivitas Sistem OSS dalam Penyederhanaan Perizinan Berusaha." *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3),

Sulistyo, T. (2023). *Reformasi Perizinan Berbasis Risiko*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyo, T. (2023). Reformasi Perizinan dan Daya Saing Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Wibisono, A. (2021). *Digitalisasi Administrasi Publik: Studi Kasus Sistem OSS di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nusantara.

Wibowo, H. (2021). Transformasi Perizinan Berbasis Risiko: Pendekatan OSS RBA. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(2),

Yusuf, A. (2022). *Peningkatan Efisiensi Perizinan di Indonesia melalui OSS Berbasis Risiko*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.

Yusuf, R., & Arifin, M. (2022). "Implementasi Perizinan Berbasis Risiko dalam OSS." *Jurnal Administrasi Negara*, 15(2).